

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang Sumatera Barat merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah di wilayah tersebut. Salah satu aspek penting dari pengelolaan keuangan adalah penggajian pegawai. Bertugas untuk mengelola dan mengatur sumber daya keuangan daerah secara. Proses penggajian yang efisien dan akurat sangat penting untuk memastikan kesejahteraan pegawai serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gaji merupakan hak yang diterima karyawan karena telah menyelesaikan kewajibannya, yaitu bekerja dalam waktu yang telah ditentukan. dalam menghitung tunjangan, insentif, potongan, menghitung gaji pegawai tetap dan pegawai kontrak sulit dilakukan dan menyita waktu yang cukup lama, sehingga dapat memperlambat dalam pemberian gaji, pembuatan laporan (Eriana dkk., 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan sistem informasi untuk mendukung proses penggajian telah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Sistem informasi pendataan dan penginputan gaji adalah solusi yang efektif untuk mengotomatisasi proses penggajian dan memastikan akurasi serta efisiensi dalam pengelolaan gaji pegawai. Saat ini, proses pendataan dan penginputan gaji pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang sudah menggunakan sistem tetapi, masih ada kendala saat penginputan data yang mengakibatkan banyaknya entri yang kurang lengkap dan sumber daya manusia (sdm) operator yang kurang, yang dapat menimbulkan

kesalahan dalam penginputan dan kehilangan data yang tidak sengaja. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Hal ini telah memberikan perhatian khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyangkut kesejahteraan termasuk di dalamnya masalah system penggajian pegawai (Cahyadi dkk., 2020).

BPKD memegang data penginputan gaji Kota Padang Panjang. Setiap pegawai ASN dapat membuka sistem dengan akun mereka masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi pendataan dan penginputan gaji di Kantor BPKD Kota Padang Panjang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem informasi ini diharapkan dapat dilakukan secara komputerisasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data gaji. Melalui penerapan sistem informasi ini, diharapkan Kantor BPKD Kota Padang Panjang dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pegawai serta mendukung tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dibutuhkan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu maka akan dirancang sebuah sistem informasi yang berjudul **“Perancangan Sistem Informasi Pendataan Dan Penginputan Gaji Di kantor BPKD Kota Padang Panjang Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP Dan DataBase MySQL”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perancangan sistem informasi ini dapat membantu khususnya dalam pendataan dan penginputan pada pegawai ASN di Kota Padang Panjang .
2. Bagaimana dengan dirancangnya sebuah sistem informasi pendataan dan penginputan pada BPKD dapat membantu dalam proses laporan menjadi lebih akurat.
3. Bagaimana dengan dirancangnya sistem informasi pendataan dan penginputan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan batabase MySQL dapat memberikan kemudahan dalam mengakses data gaji pegawai ASN di Kota Padang Panjang?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesa dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu BPKD Kota Padang Panjang dalam pendataan dan penginputan pada gaji pegawai ASN Kota Padang Panjang.
2. Diharapkan dengan sistem informasi pendataan dan penginputan dapat memberikan laporan menjadi lebih cepat.
3. Diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dapat memberikan kemudahan kepada pihak karyawan dan BPKD Kota Padang Panjang dalam Proses pendataan dan Penginputan gaji.

1.4 Batasan Masalah

Agar penulis tidak keluar dari permasalahan yang ada dan hasil penelitian dapat diperoleh dengan baik, sempurna dan terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan, yaitu :

1. Penelitian akan dilakukan di kantor BPKD Kota Padang Panjang.
2. Sistem yang dirancang terbatas pada pendataan dan penginputan gaji.
3. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP Dan Database MySQL.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan kemudahan kepada BPKD dalam proses pendataan dan penginputan.
2. Menciptakan sistem yang lebih efektif dan efisien.
3. Membuat sistem informasi pendataan dan penginputan pada BPKD Kota Padang Panjang agar memudahkan pendataan dan penginputan gaji.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian diterapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik yang berkaitan dengan penulisan yang terlihat langsung maupun tidak langsung antara lain :

1. Manfaat bagi akademik
 - a) Memberikan tambahan pengetahuan dalam meneliti suatu permasalahan yang terjadi.
 - b) Sebagai referensi bagi peneliti lain, utamanya penelitian bidang percangan atau desain website pribadi.

2. Manfaat bagi BPKD Kota Padang Panjang
 - a) Dengan adanya sistem informasi maka penyimpanan data akan lebih mudah.
 - b) Dengan adanya sistem informasi maka proses perhitungan akan lebih cepat dan akurat khususnya di bidang pendataan dan penginputan gaji pegawai.
3. Manfaat bagi penulis
 - a) Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
 - b) Mengetahui secara mendalam mengenai penerapan metode terstruktur.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

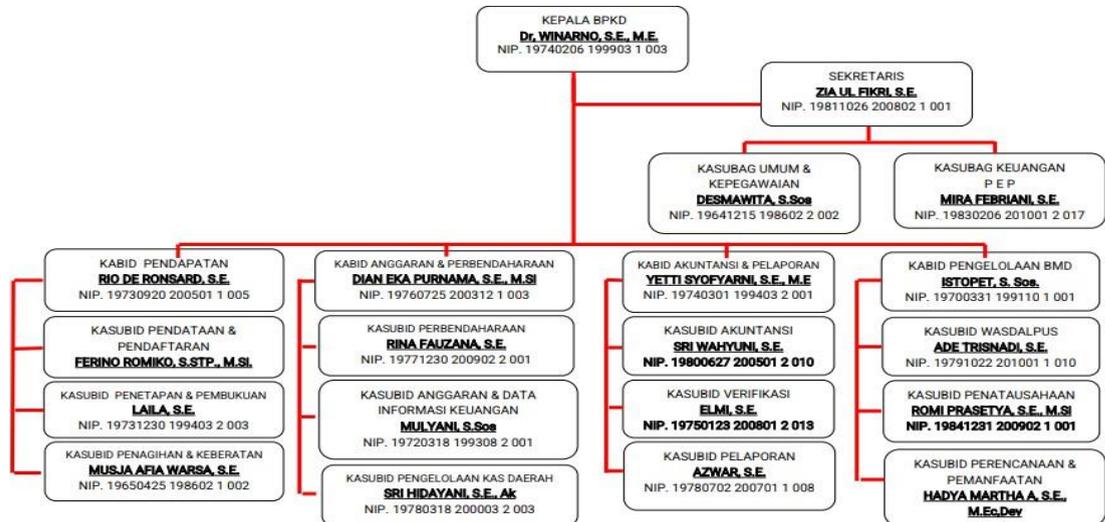
1.7.1 Profile BPKD Kota Padang Panjang

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah di Kota Padang Panjang. Tugas utamanya meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah. BPKD memiliki peran penting dalam menjaga keuangan daerah agar berjalan efisien dan transparan.

Sebagai bagian dari pemerintahan setempat, BPKD Kota Padang Panjang memiliki visi dan misi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik. Struktur organisasi BPKD biasanya mencakup berbagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi spesifik sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, BPKD Kota Padang Panjang juga terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pencairan dana, realisasi anggaran, serta agenda kegiatan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

1.7.2 Struktur Organisasi BPKD Kota Padang Panjang

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Sumber : BPKD kota padang panjang

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKD Kota Padang Panjang

1.7.3 Tanggung jawab dan wewenang di BPKD Kota Padang Panjang

Adapun tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala BPKD

Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun tugasnya lainnya yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah.
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah.
- d. pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPKD. Adapun tugasnya lainnya yaitu :

- a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Sekretaris memiliki 2 bagian yaitu :

a) Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.

b) Kasubag Umum dan P E P (Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan)

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3. Kabid Pendapatan

Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Pendapatan yang meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan dan pembukuan serta penagihan dan keberatan. Adapun tugas lainnya yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pendaftaran.
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penetapan dan pembukuan.
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penagihan dan keberatan.

4. Kabid anggaran dan Perbendaharaan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Anggaran yang meliputi penyusunan dan pengendalian anggaran, data dan informasi keuangan daerah, pengelolaan kas daerah dan perbendaharaan. Adapun tugas lainnya yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyusunan dan pengendalian anggaran.
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data dan informasi keuangan daerah.
- c. penyelenggaraan program pengelolaan kas daerah.

5. Kabid Akutansi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Akuntansi yang meliputi akuntansi, verifikasi dan pelaporan. Adapun tugas lainnya yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang akuntansi.
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang verifikasi.

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pelaporan.

6. Kabid Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang aset daerah yang meliputi penatausahaan, pengawasan, pengendalian, penghapusan, perencanaan dan pemanfaatan aset. Adapun tugas lainnya yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan barang milik daerah.
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penatausahaan barang milik daerah.